



**BAB  
2**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 disesuaikan dengan dokumen RPD Tahun 2024-2026, RKT Tahun 2024, RKPD Tahun 2024, dan PK Tahun 2024. Pengukuran kinerja dalam laporan tersebut



dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Karanganyar Tahun 2024. Seluruh tujuan/sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Karanganyar Tahun 2024 merupakan kinerja tahun pertama pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 80,67% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut.

### 1. TUJUAN

#### *Meningkatkan Daya Saing Daerah*

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA Th. 2022	REALISASI KINERJA Th. 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA Th. 2024	TARGET AKHIR RPD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA Th. 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPD
			TARGET	REALISASI			
Indek Daya Saing Daerah	3,617	3,43	3,750	3,43*	91%	3,850	89,1%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					91%		89,1%

*Keterangan : \* : Realisasi menggunakan realisasi Tahun 2023*

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024*

Realisasi indikator kinerja Tujuan Indek Daya Saing Daerah Tahun 2024 masih menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2024 belum selesai.

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja tujuan tahun 2024 yang menggunakan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 91% atau di bawah target yang ditetapkan.

## 2. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu ukuran penting yang digunakan untuk menilai daya saing suatu wilayah berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan inovasi.

Faktor-faktor pembentuk IDSD meliputi 12 pilar yaitu pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, Kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi, yang dikelompokkan ke dalam empat aspek utama: Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekosistem Inovasi.



Pada tahun 2023 capaian daya saing daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 3,43 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 pada beberapa pilar pembentuk IDSD yang berada di bawah nilai rata-rata Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, yaitu pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, keterampilan, pasar produk, sistem keuangan dan dinamisme bisnis. Jika dibandingkan dengan capaian IDSD Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IDSD Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 berada di sekitar rata-rata nasional yaitu 3,44 dan sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 3,89, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2  
Indek Daya Saing Daerah Kabupaten Karanganyar,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Tahun	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Nasional
2023	3,43	3,89	3,44

Dalam pencapaian Tujuan didukung sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
3. Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.
5. Meningkatnya wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan.

Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran adalah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.3**

INDIKATOR SASARAN	REALISASI SASARAN Th. 2022	REALISASI SASARAN Th. 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN SASARAN Th. 2024	TARGET AKHIR RPD (TAHUN 2026)	CAPAIAN SASARAN Th. 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPD
			TARGET	REALISASI			
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>							
Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan perlindungan social							
Angka Kemiskinan	9,85	9,79	8,52	9,59	87,44%	8,03	80,57%
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>							
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan							
Indeks Pembangunan Manusia	76,58	77,31	77,80	78,11	100,4%	77,68	100,55%
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>							
Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi local							
Pertumbuhan Ekonomi	5,87	5,53	6,00	5,54	92,33%	6,20	89,35%
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b>							
Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi							
Indeks Reformasi Birokrasi	62,01	70,91	72	84,47	117,32%	75	112,63%
<b>SASARAN STRATEGIS 5</b>							
Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana berbasis lingkungan							
Indeks Resiko Bencana	91,51	91,51	82	87,71	93,31%	81	91,72%
Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja					98,16%		94,96%

Sumber: Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran dari lima sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% tidak ada;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 target;

### 3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

#### 1). Angka Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 sebagaimana tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial” dengan indikator angka kemiskinan tahun 2024 adalah sebesar 87,44% atau di bawah target yang ditetapkan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Karanganyar sebesar 9,59, tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 8,52, namun mengalami penurunan jika dibanding tahun 2023 sebesar 9,79.

Pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2024 dari tahun 2023 adalah :

- Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar berkurang sebanyak 1.270 orang.
- Mereka naik kelas secara ekonomi dan tak lagi menyandang status warga miskin.
- Pemkab Karanganyar menargetkan di tahun 2024, warga miskin bisa ditekan hingga di angka 8,5 persen dari jumlah penduduk.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar di Tahun 2024 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.4  
Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi  
Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2022 – 2024

Tahun	Kab. Karanganyar		Jawa Tengah	Nasional
	(Ribu jiwa)	%		
2022	88,56	9,85	10,93	9,54
2023	88,64	9,79	10,77	9,36
2024	87,37	9,59	9,58	8,57

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2024 adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program Kawasan Permukiman
11. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
13. Program Penatagunaan Tanah
14. Program Pemberdayaan Sosial
15. Program Rehabilitasi Sosial
16. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
17. Program Penanganan Bencana
18. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi



## 2). Indek Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 2 sebagaimana tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan” dengan indikator Indek Pembangunan Manusia tahun 2024 adalah sebesar 100,4% atau melebihi/di atas target yang ditetapkan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karanganyar tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Karanganyar tahun 2024 sebesar 78,11 atau tumbuh 0,8 poin dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 77,31.

Peningkatan IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada semua komponen pembentuknya, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Angka IPM 78,11 merupakan hasil perhitungan dari nilai indikator penyusunnya yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 77,91 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 9,26 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,73 tahun dan Pengeluaran Per Kapita sebesar 12.732 ribu rupiah.

Dari sisi Pendidikan, anak-anak di Kabupaten Karanganyar yang berusia 7 tahun pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 13,73 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan hingga setingkat Diploma I atau Diploma II. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,71 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,24 tahun dari 9,02 tahun menjadi 9,26 tahun pada tahun 2024.

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten Karanganyar yang meningkat dari 75,89 pada Tahun 2019 menjadi 78,11 pada Tahun 2024 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 dan IPM nasional sebesar 75,02 pada Tahun 2024. Perbandingan capaian Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dengan capaian Indek Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.5

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karanganyar,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Nasional
2022	76,58	72,79	72,91
2023	77,31	73,39	74,39
2024	78,11	73,87	75,02

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan, sehingga perlu dipastikan dari sisi kualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan yang relevan dapat membuat suatu daerah menjadi lebih produktif dan inovatif. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pendorong utama kemajuan teknologi dan inovasi. SDM yang kreatif dan berpengetahuan dapat menciptakan solusi baru, teknologi canggih, dan memajukan berbagai sektor. Dibidang ekonomi, kualitas SDM yang baik berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan output, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indek Pembangunan Manusia Tahun 2024 adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
4. Program Pengembangan Kebudayaan;
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;



7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
11. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
12. Program Perlindungan Perempuan
13. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
14. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
15. Program Perlindungan Khusus Anak
16. Program Pengendalian Penduduk
17. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
18. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
19. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
20. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
22. Program Perencanaan Tenaga Kerja
23. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
24. Program Penempatan Tenaga Kerja

### 3). Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 3 sebagaimana tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal” dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 adalah sebesar 92,33% atau di bawah target yang ditetapkan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 sebesar 5,54 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.



Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karanganyar yang relative tinggi. Dari 17 kategori lapangan usaha yang ada, tidak ada yang mengalami pertumbuhan negatif tetapi ada 4 lapangan usaha yang mengalami perlambatan atau tumbuh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu lapangan usaha industri pengolahan yang melambat menjadi 0,43 persen akibat tumbangya industri tekstil antara lain PT. Kusuma Group di Kabupaten Karanganyar. Lapangan usaha konstruksi, hal ini disebabkan mega proyek yang dibiayai oleh APBN telah selesai pembangunannya di tahun 2024 ini. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melambat sebesar 0,83 persen. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mengalami peningkatan tetapi tidak sebesar tahun lalu. Lapangan usaha berikutnya yang mengalami perlambatan adalah jasa keuangan dan asuransi. Jasa kesehatan mengalami perlambatan sebesar 0,46 persen, Lapangan usaha terakhir yang mengalami perlambatan adalah jasa lainnya.

Lapangan usaha yang mengalami percepatan atau tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya adalah lapangan usaha pertanian yang tumbuh sebesar 1,14 persen, pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 5,93 persen, pengadaan listrik dan gas tumbuh 8,56 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar 2,76 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 11,16 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh tertinggi mencapai sebesar 19,93 persen, real estate tumbuh sebesar 8,09 persen, jasa perusahaan tumbuh sebesar 10,72 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 5,50 persen, jasa pendidikan tumbuh 2,27 persen.



**Tabel**  
**Table** 12.4

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar (persen), 2020–2024**  
**Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Karanganyar Regency (percent), 2020–2024**

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,26	2,16	2,85	0,11	1,14
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,25	3,18	-6,71	4,27	5,93
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-1,29	3,37	4,15	5,83	5,40
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-1,36	4,46	4,38	6,11	8,56
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,93	6,04	1,64	1,10	2,76
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	-4,81	6,68	3,37	10,24	6,92
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-4,00	6,47	4,63	4,66	3,83
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-22,13	2,81	70,54	8,23	11,16
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-6,93	6,71	21,87	12,17	19,93
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	16,33	5,50	2,15	5,47	5,04



Lanjutan Tabel/Continued Table 12.4

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,77	1,59	1,44	3,63	2,07
L Real Estat/Real Estate Activities	-0,36	1,79	4,58	5,70	8,09
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-4,94	2,86	5,31	8,44	10,72
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-1,51	-0,76	1,04	1,73	5,50
P Jasa Pendidikan/Education	-0,17	0,04	2,25	1,97	2,27
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	7,88	0,23	2,12	5,66	5,20
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	-4,95	1,43	16,43	18,68	8,65
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>-1,87</b>	<b>3,59</b>	<b>5,86</b>	<b>5,53</b>	<b>5,54</b>

Catatan/Notes: \* Angka Sementara/ Preliminary Figures

\*\* Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2024 lebih tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Nasional
2022	5,87	5,31	5,31
2023	5,53	4,98	5,05
2024	5,54	4,95	5,03



Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 antara lain :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
7. Program Pelayanan Penanaman Modal
8. Program Pengeloan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
9. Program Pemasaran Pariwisata
10. Program Peningkatan Disversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
15. Program Perekonomian Dan Pembangunan

#### 4). Indek Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 4 sebagaimana tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi” dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi tahun 2024 adalah sebesar 117,32% atau melebihi/di atas target yang ditetapkan.

Capaian Indek RB Kabupaten Karanganyar tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 namun masih dibawah capaian Indek RB Provinsi Jateng tahun 2024 dan diatas rata-rata capaian Indek RB Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2023.

Perbandingan capaian Indek RB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Rata-rata Nasional sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.7

Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar,  
Provinsi Jawa Tengah dan Rata-rata Nasional Tahun 2023-2024

Tahun	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Rata-rata Nasional
2023	70,91	83,13	59,32
2024	84,47	91,11	59,32*

*Keterangan : \* : Realisasi menggunakan realisasi Tahun 2023*

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan tahun terakhir pelaksanaan RoadMap 2020-2024 berdasarkan PermenPANRB No. 25 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, di antaranya:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi RB untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu RB General dan Tematik;
2. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan rencana aksi RB secara periodik (triwulanan). Hal ini dilakukan guna mengetahui progres pelaksanaan atas setiap program kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekaligus opsi solusi yang dapat dilakukan.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
4. Program Perumusan Kebijakan, Pemdampingan Dan Asistensi
5. Program Kepegawaian Daerah
6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



#### 5). Indek Resiko Bencana

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 5 sebagaimana tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan” dengan indikator indek resiko bencana tahun 2024 adalah sebesar 93,31% atau di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja Indek Resiko Bencana Tahun 2024 sebesar 87,71, meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 91,51, namun belum mencapai target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 82 karena penilaian Indek Resiko Bencana dilakukan oleh BNPB dengan memperhitungkan indikator yang jumlahnya sangat banyak. Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Karanganyar tahun 2024 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Indek Resiko Bencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Indek Resiko Bencana Kabupaten Karanganyar,  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tahun	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah
2024	87,71	99,61

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indek Resiko Bencana Tahun 2024 adalah :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Peyuluhan Lingkungan
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Sampah
10. Program Konservasi Sumber Day Alam Hayati Dan Ekosistemnya



11. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

12. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

#### 4. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber Anggaran dalam pencapaian tujuan antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan :

Tabel 3.9

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.651.966.662	8.921.017.955,00	92,43	7,57
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	14.123.469.000	13.560.398.309,00	96,01	3,99
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.299.066.500	6.269.711.000,00	99,53	0,47
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.624.770.000	3.430.087.607,00	94,63	5,37
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.205.960.000	3.430.087.607,00	81,55	18,45
		Program Penyelenggaraan Jalan	234.555.126.325	202.835.936.695,00	86,48	13,52
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250.255.400	245.697.900,00	98,18	1,82
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.337.984.000	1.555.719.933,00	116,27	(16,27)
		Program Pengembangan Perumahan	110.000.000	109.453.850,00	99,50	0,50
		Program Kawasan Permukiman	534.250.000	532.102.000,00	99,60	0,40
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.255.825.000	1.232.069.750,00	98,11	1,89
		Program Penatagunaan Tanah	474.198.000	471.075.500,00	99,34	0,66
		Program Pemberdayaan Sosial	680.235.400	672.577.450,00	98,87	1,13
		Program Rehabilitasi Sosial	1.342.028.050	1.300.950.440,00	96,94	3,06
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7.626.563.748	7.527.036.736,00	98,69	1,31
		Program Penanganan Bencana	150.559.000	150.192.250,00	99,76	0,24
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	14.923.000,00	99,49	0,51
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>286.277.257.085</b>	<b>252.299.037.982</b>	<b>88,13</b>	<b>11,87</b>
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Program Pengelolaan Pendidikan	218.470.137.165	216.559.862.884,00	99,13	0,87
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	50.000.000	45.274.000,00	90,55	9,45
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	15.600.000	15.400.000,00	98,72	1,28
		Program Pengembangan Kebudayaan	2.711.568.000	2.709.500.000,00	99,92	0,08
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.829.800.000	1.785.828.200,00	97,60	2,40



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	123.200.000	122.833.000,00	99,70	0,30
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	99.736.691.775,00	92.841.365.362,00	93,09	6,91
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.229.501.000	3.968.632.000,00	93,83	6,17
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	678.536.300	673.281.300,00	99,23	0,77
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	636.922.550	633.873.550,00	99,52	0,48
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000	21.457.816,00	85,83	14,17
		Program Perlindungan Perempuan	30.000.000	27.643.300,00	92,14	7,86
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	195.000.000	180.935.250,00	92,79	7,21
		Program Perlindungan Khusus Anak	30.000.000	25.444.000,00	84,81	15,19
		Program Pengendalian Penduduk	510.200.000	500.995.355,00	98,20	1,80
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	9.782.995.000	9.387.439.096,00	95,96	4,04
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.018.400.000	4.993.126.700,00	99,50	0,50
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	430.000.000	429.810.000,00	99,96	0,04
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.560.890.000	12.510.847.000,00	92,26	7,74
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00	0,00
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	8.927.250	7.678.200,00	86,01	13,99
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.806.619.750	1.768.364.555,00	97,88	2,12
		Program Penempatan Tenaga Kerja	143.200.000,00	140.225.150,00	97,92	2,08
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>361.123.188.790</b>	<b>350.449.816.718</b>	<b>97,04</b>	<b>2,96</b>
	Meningkatnya Daya Saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.293.892.810	3.226.848.723,00	97,96	2,04
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000	9.965.450,00	99,65	0,35
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000	72.986.125,00	97,31	2,69
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	125.000.000	121.650.200,00	97,32	2,68
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.499.658.000	1.478.454.150,00	98,59	1,41
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.665.000.000	1.563.539.428,00	93,91	6,09
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	479.150.000	475.056.900,00	99,15	0,85
		Program Pengembangan Umkm	4.442.500.000	4.392.490.000,00	98,87	1,13
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	10.000.000	9.663.200,00	96,63	3,37
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	35.000.000	34.644.600,00	98,98	1,02
		Program Promosi Penanaman Modal	25.000.000	24.688.200,00	98,75	1,25
		Program Pelayanan Penanaman Modal	311.156.000	300.848.400,00	96,69	3,31
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	634.436.000	604.614.000,00	95,30	4,70
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.000.000	14.596.000,00	97,31	2,69
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.899.780.000	2.652.766.024,00	91,48	8,52
		Program Pemasaran Pariwisata	629.200.000	629.200.000,00	100,00	0,00



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	35.000.000	35.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.329.480.000	1.319.846.000,00	99,28	0,72
		Program Peningkatan Disversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	118.350.000	117.753.000,00	99,50	0,50
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	15.000.000	15.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	650.500.000	647.075.000,00	99,47	0,53
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	30.000.000	29.998.500,00	100,00	0,00
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	32.500.000	31.902.250,00	98,16	1,84
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.943.896.000	21.474.522.800,00	93,60	6,40
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.611.678.850	6.069.647.893,00	91,80	8,20
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	49.057.500	215.496.100,00	439,27	(339,27)
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00	4,00
		Program Penyuluhan Pertanian	514.930.000	514.586.650,00	99,93	0,07
		Program Hubungan Industrial	236.000.000	241.105.900,00	102,16	(2,16)
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.759.500	10.624.700,00	98,75	1,25
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.071.400.000	1.064.603.350,00	99,37	0,63
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	27.232.600,00	27.170.150,00	99,77	0,23
		Program Pengembangan Ekspor	45.117.900	44.890.400,00	99,50	0,50
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	45.000.000	44.209.940,00	98,24	1,76
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	200.000.000	197.547.200,00	98,77	1,23
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.553.865.000	1.533.475.985,00	98,69	1,31
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.000.000	14.870.200,00	99,13	0,87
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.300.000	48.934.250,00	99,26	0,74
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.626.550.000	1.531.830.357,00	94,18	5,82
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>53.385.390.160</b>	<b>50.866.102.025</b>	<b>95,28</b>	<b>4,72</b>
	Meningkatnya tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	15.517.820.000	15.357.146.057,00	98,96	1,04
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	34.043.635.326	29.385.570.843,00	86,32	13,68
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.747.459.767	1.593.411.660,00	91,18	8,82
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	443.302.100	409.816.173,00	92,45	7,55
		Program Kepegawaian Daerah	2.221.637.000	1.936.731.545,00	87,18	12,82
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	969.760.300	917.334.568,00	94,59	5,41
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>54.943.614.493</b>	<b>49.600.010.846</b>	<b>90,27</b>	<b>9,73</b>
	Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Program Penanggulangan Bencana	2.679.849.000	2.681.034.698,00	100,04	(0,04)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	275.000.000	273.286.975,00	99,38	0,62
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.707.003.000	1.687.008.474,00	98,83	1,17
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	160.000.000	155.418.600,00	97,14	2,86



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	118.000.000	117.645.100,00	99,70	0,30
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Peyuluhan Lingkungan	93.500.000	93.200.150,00	99,68	0,32
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.000.000	17.319.000,00	96,22	3,78
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7.413.500.000	19.997.600,00	0,27	99,73
		Program Pengelolaan Sampah	7.383.500.000	7.241.896.557,00	98,08	1,92
		Program Konservasi Sumber Day Alam Hayati Dan Ekosistemnya	30.000.000	28.619.525,00	95,40	4,60
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.758.172.482	7.521.673.648,00	96,95	3,05
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.129.898.200	1.114.533.500,00	98,64	1,36
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>28.766.422.682</b>	<b>20.951.633.827</b>	<b>72,83</b>	<b>27,17</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>784.495.873.210,00</b>	<b>724.166.601.398,00</b>	<b>92,31</b>	<b>7,69</b>

#### 5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan, sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.10

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	87,44	88,13	11,87
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	100,4	97,04	2,96
	Meningkatnya Daya Saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	92,33	95,28	4,72
	Meningkatnya tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	117,32	90,27	9,73



	Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	93,31	92,31	7,69
--	--	-------	-------	------

Berdasarkan tabel 3.10 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan capaian kinerja sasaran rata-rata 98,16% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



## B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

APBD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah. RKPD kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

1. aspirasi masyarakat;
2. kinerja pemerintah daerah sebelumnya;
3. perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional;
4. potensi daerah.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP 2023 guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan publik.



Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2024 diprioritaskan pada :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :
  - a. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;
  - b. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
  - c. Peningkatan pengelolaan arsip digital;
  - d. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
  - e. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
  - f. Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;
2. Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada :
  - a. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama untuk pemilih pemula;
  - c. Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
3. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :



- a. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b. Pengendalian penduduk melalui peningkatkan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera;
  - c. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;
  - d. Pengembangan budaya literasi masyarakat;
  - e. Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - f. Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
  - g. Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar budaya;
  - h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.
4. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem difokuskan pada :
- a. Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri;
  - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
  - c. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan penguatan branding;
  - d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
  - e. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;



- f. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
  - h. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja;
  - i. Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan kualitas sarpras daya tarik wisata dan desa wisata.
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
- a. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
  - b. Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
  - c. Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan akses sanitasi layak;
  - d. Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir dan peningkatan kualitas sistem irigasi.

Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dasar hukum penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;



3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;

### **2.2.1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui :
  - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
  - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
  - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
  - d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
  - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
  - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
  - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
  - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
3. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;



5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- Tabel berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun berturut-turut :

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2023**

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>2.508.977.540.239,00</b>	<b>2.519.378.722.414,00</b>	<b>2.232.170.487.885,00</b>	<b>2.255.233.786.402,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>436.925.854.831,00</b>	<b>453.827.906.415,00</b>	<b>406.337.151.885,00</b>	<b>441.806.235.537,00</b>
Pajak Daerah - LRA	217.700.930.000,00	245.820.209.492,00	205.946.600.000,00	235.835.863.168,00
Retribusi Daerah - LRA	188.926.096.068,00	144.188.257.925,00	9.522.760.800,00	10.329.283.857,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	21.037.753.463,00	21.566.721.990,00	18.831.712.806,00	19.207.774.395,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	9.261.075.300,00	42.262.717.008,00	172.036.078.279,00	176.433.314.117,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>2.070.563.685.408,00</b>	<b>2.064.062.815.999,00</b>	<b>1.818.623.336.000,00</b>	<b>1.806.777.550.865,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	<b>1.821.681.568.818,00</b>	<b>1.812.604.755.890,00</b>	<b>1.628.670.142.000,00</b>	<b>1.610.778.999.134,00</b>
Dana Perimbangan - LRA	1.607.406.388.818,00	1.598.329.575.890,00	1.436.682.398.000,00	1.424.682.138.634,00
Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	32.701.326.000,00	32.701.326.000,00	11.781.767.000,00	5.890.883.500,00
Dana Desa - LRA	181.573.854.000,00	181.573.854.000,00	180.205.977.000,00	180.205.977.000,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA</b>	<b>248.882.116.590,00</b>	<b>251.458.060.109,00</b>	<b>189.953.194.000,00</b>	<b>195.998.551.731,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil - LRA	182.546.569.590,00	186.729.872.109,00	177.533.194.000,00	184.436.831.731,00
Bantuan Keuangan - LRA	66.335.547.000,00	64.728.188.000,00	12.420.000.000,00	11.561.720.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>1.488.000.000,00</b>	<b>1.488.000.000,00</b>	<b>7.210.000.000,00</b>	<b>6.650.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah - LRA	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00	7.210.000.000,00	6.650.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, unaudited

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2023**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>2.519.378.722.414,00</b>	<b>2.255.233.786.402,00</b>	<b>264.144.936.012,00</b>	<b>11,71</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>453.827.906.415,00</b>	<b>441.806.235.537,00</b>	<b>12.021.670.878,00</b>	<b>2,72</b>
Pajak Daerah - LRA	245.820.209.492,00	235.835.863.168,00	9.984.346.324,00	4,23
Retribusi Daerah - LRA	144.188.257.925,00	10.329.283.857,00	133.858.974.068,00	1.295,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	21.566.721.990,00	19.207.774.395,00	2.348.947.595,00	12,23
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	42.262.717.008,00	176.433.314.117,00	(134.170.597.109,00)	(76,05)
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>2.064.062.815.999,00</b>	<b>1.806.777.550.865,00</b>	<b>257.285.265.134,00</b>	<b>14,24</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	<b>1.812.604.755.890,00</b>	<b>1.610.778.999.134,00</b>	<b>201.825.756.756,00</b>	<b>12,53</b>



Dana Perimbangan - LRA	1.598.329.575.890,00	1.424.682.138.634,00	173.647.437.256,00	12,19
Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	32.701.326.000,00	5.890.883.500,00	26.810.442.500,00	455,12
Dana Desa - LRA	181.573.854.000,00	180.205.977.000,00	1.367.877.000,00	0,76
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA</b>	<b>251.458.060.109,00</b>	<b>195.998.551.731,00</b>	<b>55.459.508.378,00</b>	<b>28,30</b>
Pendapatan Bagi Hasil - LRA	186.729.872.109,00	184.436.831.731,00	2.293.040.378,00	1,24
Bantuan Keuangan - LRA	64.728.188.000,00	11.561.720.000,00	53.166.468.000,00	459,85
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>1.488.000.000,00</b>	<b>6.650.000.000,00</b>	<b>(5.162.000.000,00)</b>	<b>(77,62)</b>
Pendapatan Hibah - LRA	1.488.000.000,00	6.650.000.000,00	(5.162.000.000,00)	(77,62)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 unaudited

Berdasarkan tabel 3.35 dan 3.36 realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp264.144.936.012,00 atau 11,71% dibandingkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2023. Pendapatan retribusi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp133.858.974.068,00 atau 1.295,92% dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi tahun 2023. Sedangkan penurunan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang paling signifikan terdapat pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5.162.000.000,00 atau 77,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

#### 1. Permasalahan Bidang Pendapatan

Permasalahan Umum dalam Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Miskinnya Sumber Daya Alam.
- b. Adanya beberapa aset / obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karanganyar;
- c. Kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah masih belum sesuai harapan kita;
- d. Situasi dan kondisi negara yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
- e. Penentuan besarnya Alokasi Dana Perimbangan menjadi kewenangan Pemerintah Atasan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

#### 2. Pemecahan Masalah Pengelolaan Pendapatan Daerah



Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah supaya tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan.
- d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui pernyataan modal atau investasi.
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan jalan :

1. Mengadakan rapat koordinasi pendapatan daerah secara berkala, agar dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicari jalan keluarnya;
2. Mengadakan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing sumber pendapatan secara berkesinambungan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang kontribusinya cukup besar dan masih dapat untuk ditingkatkan;
3. Mengadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah di bidang Pendapatan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
4. Menyusun Peraturan Daerah yang baru disesuaikan dengan potensi dan kewenangan daerah;
5. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan untuk menghindari adanya kebocoran penerimaan pendapatan daerah;



6. Menggiatkan penyuluhan-penyuluhan untuk menjadikan masyarakat lebih mengetahui kewajibannya sejalan dengan kebutuhan dana bagi Pemerintah;
7. Mendorong Penguatan Modal Usaha, Penyehatan dan Peningkatan Kinerja BUMD;
8. Pemanfaatan peluang melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

**b. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Dalam rangka penyusunan Belanja Daerah, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia maka Pemerintah daerah menetapkan kebijakan umum anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik;
2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. Belanja daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah didasarkan pada standar satuan harga (terutama dalam pengadaan barang dan jasa). Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;



6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa atau Dana Kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Prestasi Kerja untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;
2. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji ketiga belas maupun Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Di samping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
4. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);



6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;
9. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
10. Penganggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di samping itu belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan;
11. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Khusus penganggaran



pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

12. Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;
13. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
14. Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-masing SKPD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
15. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun target dan realisasi dari belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Karanganyar dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.13**  
**Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2023**

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.616.828.521.954,00</b>	<b>2.480.301.422.553,00</b>	<b>2.405.702.831.778,00</b>	<b>2.299.195.046.467,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.853.854.679.331,00</b>	<b>1.764.199.090.294,00</b>	<b>1.758.721.053.077,00</b>	<b>1.673.035.410.311,00</b>
Belanja Pegawai	1.064.166.337.342,00	1.018.327.815.110,00	1.008.682.364.483,00	957.879.263.716,00
Belanja Barang dan Jasa	639.656.492.857,00	598.278.919.534,00	620.225.842.771,00	587.494.693.838,00
Belanja Hibah	144.148.643.120,00	141.712.649.650,00	123.716.178.923,00	121.687.378.115,00
Belanja Bantuan Sosial	5.883.206.012,00	5.879.706.000,00	6.096.666.900,00	5.974.074.642,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>369.304.539.129,00</b>	<b>333.809.338.567,00</b>	<b>274.016.869.221,00</b>	<b>253.727.694.797,00</b>
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	1.000.000.000,00	722.350.230,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.121.825.752,00	79.861.835.455,00	62.998.023.826,00	57.323.831.226,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.840.905.050,00	40.255.091.301,00	116.826.583.000,00	110.570.961.071,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.759.635.615,00	204.332.803.067,00	64.317.117.200,00	56.325.661.835,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.502.172.712,00	9.279.770.095,00	28.700.145.195,00	28.612.040.435,00
Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	79.838.649,00	175.000.000,00	172.850.000,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>13.488.475.894,00</b>	<b>2.187.166.092,00</b>	<b>2.550.000.000,00</b>	<b>2.067.038.879,00</b>
Belanja Tak Terduga	13.488.475.894,00	2.187.166.092,00	2.550.000.000,00	2.067.038.879,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>380.180.827.600,00</b>	<b>380.105.827.600,00</b>	<b>370.414.909.480,00</b>	<b>370.364.902.480,00</b>
Belanja bagi hasil	22.785.826.900,00	22.785.826.900,00	21.566.767.080,00	21.566.767.080,00
Transfer Bantuan Keuangan	357.395.000.700,00	357.320.000.700,00	348.848.142.400,00	348.798.135.400,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 unaudited

**Tabel 3. 14**  
**Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2024 – 2023**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.480.301.422.553,00</b>	<b>2.299.195.046.467,00</b>	<b>181.106.376.086,00</b>	<b>7,88</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.764.199.090.294,00</b>	<b>1.673.035.410.311,00</b>	<b>91.163.679.983,00</b>	<b>5,45</b>
Belanja Pegawai	1.018.327.815.110,00	957.879.263.716,00	60.448.551.394,00	6,31
Belanja Barang dan Jasa	598.278.919.534,00	587.494.693.838,00	10.784.225.696,00	1,84
Belanja Hibah	141.712.649.650,00	121.687.378.115,00	20.025.271.535,00	16,46
Belanja Bantuan Sosial	5.879.706.000,00	5.974.074.642,00	(94.368.642,00)	(1,58)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>333.809.338.567,00</b>	<b>253.727.694.797,00</b>	<b>80.081.643.770,00</b>	<b>31,56</b>
Belanja Modal Tanah	0,00	722.350.230,00	(722.350.230,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.861.835.455,00	57.323.831.226,00	22.538.004.229,00	39,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.255.091.301,00	110.570.961.071,00	(70.315.869.770,00)	(63,59)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	204.332.803.067,00	56.325.661.835,00	148.007.141.232,00	262,77
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.279.770.095,00	28.612.040.435,00	(19.332.270.340,00)	(67,57)
Belanja Modal Aset Lainnya	79.838.649,00	172.850.000,00	(93.011.351,00)	(53,81)



BELANJA TAK TERDUGA	2.187.166.092,00	2.067.038.879,00	120.127.213,00	5,81
Belanja Tak Terduga	2.187.166.092,00	2.067.038.879,00	120.127.213,00	5,81
BELANJA TRANSFER	380.105.827.600,00	370.364.902.480,00	9.740.925.120,00	2,63
Belanja bagi hasil	22.785.826.900,00	21.566.767.080,00	1.219.059.820,00	5,65
Transfer Bantuan Keuangan	357.320.000.700,00	348.798.135.400,00	8.521.865.300,00	2,44

Sumber : *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 unaudited*

Berdasarkan tabel 3.37 dan 3.38 realisasi belanja daerah tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp181.106.376.086,00 dibandingkan belanja daerah tahun Anggaran 2023. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp148.007.141.232,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Sedangkan realisasi belanja modal Gedung dan bangunan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar Rp70.315.869.770,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

## 2.2.2. Pembiayaan Daerah

### a. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Arah kebijakan umum pembiayaan yaitu adanya peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapkan penyertaan modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan daerah diharapkan untuk bisa surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan penyertaan



modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi kas daerah akan terjamin atau likuid.

Dalam penganggarannya Pembiayaan daerah dianggarkan dalam dua bagian yaitu :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dan cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai imbalan atas diterimanya utang serta, perlu disesuaikan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan yang semakin besar menunjukkan defisit APBD yang semakin besar pula.

Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.15**  
**Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2023**

URAIAN	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	129.863.981.715,00	129.907.601.715,00	184.282.573.893,00	184.418.202.893,00
Penggunaan SiLPA	129.863.981.715,00	129.862.981.715,00	184.282.573.893,00	184.335.562.893,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	44.620.000,00	0,00	82.640.000,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	22.013.000.000,00	22.000.000.000,00	10.750.230.000,00	10.750.230.000,00
Penyertaan Modal Daerah	22.013.000.000,00	22.000.000.000,00	10.750.230.000,00	10.750.230.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>151.876.981.715,00</b>	<b>151.907.601.715,00</b>	<b>173.532.343.893,00</b>	<b>173.667.972.893,00</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 unaudited

**Tabel 3.16**  
**Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2023**

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	129.907.601.715,00	184.418.202.893,00	<b>(54.510.601.178,00)</b>	<b>(29,56)</b>
Penggunaan SiLPA	129.862.981.715,00	184.335.562.893,00	(54.472.581.178,00)	(29,55)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	44.620.000,00	82.640.000,00	(38.020.000,00)	(46,01)
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	22.000.000.000,00	10.750.230.000,00	<b>11.249.770.000,00</b>	<b>104,65</b>
Penyertaan Modal Daerah	22.000.000.000,00	10.750.230.000,00	11.249.770.000,00	104,65
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	151.907.601.715,00	173.667.972.893,00	<b>(21.760.371.178,00)</b>	<b>(12,53)</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 unaudited

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 untuk Melaksanakan Sasaran Strategis**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.651.966.662	8.921.017.955,00	92,43	7,57
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	14.123.469.000	13.560.398.309,00	96,01	3,99
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.299.066.500	6.269.711.000,00	99,53	0,47
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.624.770.000	3.430.087.607,00	94,63	5,37
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.205.960.000	3.430.087.607,00	81,55	18,45
		Program Penyelenggaraan Jalan	234.555.126.325	202.835.936.695,00	86,48	13,52
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250.255.400	245.697.900,00	98,18	1,82
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.337.984.000	1.555.719.933,00	116,27	(16,27)
		Program Pengembangan Perumahan	110.000.000	109.453.850,00	99,50	0,50
		Program Kawasan Permukiman	534.250.000	532.102.000,00	99,60	0,40



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.255.825.000	1.232.069.750,00	98,11	1,89
		Program Penatagunaan Tanah	474.198.000	471.075.500,00	99,34	0,66
		Program Pemberdayaan Sosial	680.235.400	672.577.450,00	98,87	1,13
		Program Rehabilitasi Sosial	1.342.028.050	1.300.950.440,00	96,94	3,06
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7.626.563.748	7.527.036.736,00	98,69	1,31
		Program Penanganan Bencana	150.559.000	150.192.250,00	99,76	0,24
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	14.923.000,00	99,49	0,51
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>286.277.257.085</b>	<b>252.299.037.982</b>	<b>88,13</b>	<b>11,87</b>
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan	Program Pengelolaan Pendidikan	218.470.137.165	216.559.862.884,00	99,13	0,87
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	50.000.000	45.274.000,00	90,55	9,45
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	15.600.000	15.400.000,00	98,72	1,28
		Program Pengembangan Kebudayaan	2.711.568.000	2.709.500.000,00	99,92	0,08
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.829.800.000	1.785.828.200,00	97,60	2,40
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	123.200.000	122.833.000,00	99,70	0,30
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	99.736.691.775,00	92.841.365.362,00	93,09	6,91
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.229.501.000	3.968.632.000,00	93,83	6,17
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	678.536.300	673.281.300,00	99,23	0,77
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	636.922.550	633.873.550,00	99,52	0,48
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000	21.457.816,00	85,83	14,17
		Program Perlindungan Perempuan	30.000.000	27.643.300,00	92,14	7,86
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	195.000.000	180.935.250,00	92,79	7,21
		Program Perlindungan Khusus Anak	30.000.000	25.444.000,00	84,81	15,19
		Program Pengendalian Penduduk	510.200.000	500.995.355,00	98,20	1,80
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	9.782.995.000	9.387.439.096,00	95,96	4,04
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.018.400.000	4.993.126.700,00	99,50	0,50
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	430.000.000	429.810.000,00	99,96	0,04
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.560.890.000	12.510.847.000,00	92,26	7,74
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00	0,00
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	8.927.250	7.678.200,00	86,01	13,99
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.806.619.750	1.768.364.555,00	97,88	2,12
		Program Penempatan Tenaga Kerja	143.200.000,00	140.225.150,00	97,92	2,08
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>361.123.188.790</b>	<b>350.449.816.718</b>	<b>97,04</b>	<b>2,96</b>
	Meningkatnya Daya Saing perekonomian dengan bersumber potensi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.293.892.810	3.226.848.723,00	97,96	2,04
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000	9.965.450,00	99,65	0,35
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000	72.986.125,00	97,31	2,69



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	125.000.000	121.650.200,00	97,32	2,68
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.499.658.000	1.478.454.150,00	98,59	1,41
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.665.000.000	1.563.539.428,00	93,91	6,09
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha	479.150.000	475.056.900,00	99,15	0,85
		Program Pengembangan Umkm	4.442.500.000	4.392.490.000,00	98,87	1,13
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	10.000.000	9.663.200,00	96,63	3,37
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	35.000.000	34.644.600,00	98,98	1,02
		Program Promosi Penanaman Modal	25.000.000	24.688.200,00	98,75	1,25
		Program Pelayanan Penanaman Modal	311.156.000	300.848.400,00	96,69	3,31
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	634.436.000	604.614.000,00	95,30	4,70
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.000.000	14.596.000,00	97,31	2,69
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.899.780.000	2.652.766.024,00	91,48	8,52
		Program Pemasaran Pariwisata	629.200.000	629.200.000,00	100,00	0,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	35.000.000	35.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.329.480.000	1.319.846.000,00	99,28	0,72
		Program Peningkatan Disversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	118.350.000	117.753.000,00	99,50	0,50
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	15.000.000	15.000.000,00	100,00	0,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	650.500.000	647.075.000,00	99,47	0,53
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	30.000.000	29.998.500,00	100,00	0,00
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	32.500.000	31.902.250,00	98,16	1,84
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.943.896.000	21.474.522.800,00	93,60	6,40
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.611.678.850	6.069.647.893,00	91,80	8,20
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	49.057.500	215.496.100,00	439,27	(339,27)
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00	4,00
		Program Penyuluhan Pertanian	514.930.000	514.586.650,00	99,93	0,07
		Program Hubungan Industrial	236.000.000	241.105.900,00	102,16	(2,16)
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.759.500	10.624.700,00	98,75	1,25
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.071.400.000	1.064.603.350,00	99,37	0,63
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	27.232.600,00	27.170.150,00	99,77	0,23
		Program Pengembangan Ekspor	45.117.900	44.890.400,00	99,50	0,50
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	45.000.000	44.209.940,00	98,24	1,76
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	200.000.000	197.547.200,00	98,77	1,23
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.553.865.000	1.533.475.985,00	98,69	1,31
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.000.000	14.870.200,00	99,13	0,87
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.300.000	48.934.250,00	99,26	0,74
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.626.550.000	1.531.830.357,00	94,18	5,82
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>53.385.390.160</b>	<b>50.866.102.025</b>	<b>95,28</b>	<b>4,72</b>



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	efisiensi
	Meningkatnya tata	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	15.517.820.000	15.357.146.057,00	98,96	1,04
	Pemerintahan yang berkualitas dengan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	34.043.635.326	29.385.570.843,00	86,32	13,68
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.747.459.767	1.593.411.660,00	91,18	8,82
		Program Perumusan Kebijakan, Pemdampingan Dan Asistensi	443.302.100	409.816.173,00	92,45	7,55
		Program Kepegawaian Daerah	2.221.637.000	1.936.731.545,00	87,18	12,82
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	969.760.300	917.334.568,00	94,59	5,41
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>54.943.614.493</b>	<b>49.600.010.846</b>	<b>90,27</b>	<b>9,73</b>
	Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Program Penanggulangan Bencana	2.679.849.000	2.681.034.698,00	100,04	(0,04)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	275.000.000	273.286.975,00	99,38	0,62
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.707.003.000	1.687.008.474,00	98,83	1,17
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	160.000.000	155.418.600,00	97,14	2,86
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	118.000.000	117.645.100,00	99,70	0,30
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Peyuluhan Lingkungan	93.500.000	93.200.150,00	99,68	0,32
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.000.000	17.319.000,00	96,22	3,78
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7.413.500.000	19.997.600,00	0,27	99,73
		Program Pengelolaan Sampah	7.383.500.000	7.241.896.557,00	98,08	1,92
		Program Konservasi Sumber Day Alam Hayati Dan Ekosistemnya	30.000.000	28.619.525,00	95,40	4,60
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.758.172.482	7.521.673.648,00	96,95	3,05
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	1.129.898.200	1.114.533.500,00	98,64	1,36
		<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>28.766.422.682</b>	<b>20.951.633.827</b>	<b>72,83</b>	<b>27,17</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>784.495.873.210,00</b>	<b>724.166.601.398,00</b>	<b>92,31</b>	<b>7,69</b>